**BAB I**

**PENGARUH KONFLIK UKRAINA TERHADAP BERGABUNGNYA KRIMEA PADA FEDERASI RUSIA.**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Fenomena Krisis Ukraina pada tahun 2014 membuat dunia Internasional memfokuskan pandangan terhadap kawasan eropa timur. Konflik Ukraina sendiri melibatkan *aktor state* dan *non-state*,dengan adanya superioritas kedaulatan negara yang direpresentasikan oleh Rusia dan Ukraina serta aktor non-state yang direpresentasikan oleh Batalion Azov di pihak Ukraina,dan militant Pro-Rusia yang mayoritas aksinya berada di timur Ukraina dan mencakup semenanjung Krimea. Tidak hanya itu, konflik ini juga melibatkan negara-negara lain untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan konflik serta mendapat respon yang cukup besar oleh Persatuan Bangsa-Bangsa(PBB).[[1]](#footnote-2)

Republik Rakyat Ukraina atau Republik Nasional Ukraina atau Ukraina adalah pendahulunya negara Ukraina modern yang dinyatakan tanggal 23 Juni 1917 pada awalnya sebagai bagian dari Pemerintahan Sementara Rusia setelah Revolusi Rusia. Negara ini memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 25 Januari 1918. Selama keberadaannya republik pendek ini melalui beberapa transformasi politik dari republik sosialis lunak dipimpin oleh dewan Tengah dengan perusahaan sekretariat Umum ke nasional republik, yang dipimpin oleh Direktorat dan Symon Petlyura .

Antara April dan Desember 1918 Republik Rakyat Ukraina digulingkan oleh Negara Ukraina dari Pavlo Skoropadskypada musim gugur 1919 yaitu sekutu dari Republik Polandia Kedua . Tapi saat itu negara ini secara de-facto tidak ada. Pada 18 Maret 1921 Perjanjian Riga antara Republik Polandia Kedua, RSFS Rusia (bertindak juga atas nama RSS Byelorusia ) dan Republik Soviet Ukraina menyegel kekuatan Republik Rakyat Ukraina. Setelah Revolusi Oktober di Ukraina pemerintahan Republik Rakyat Ukraina yang ada di Kiev dan Republik Soviet Ukraina yang berada di Kharkiv mengalami konflik permanen antara satu sama lain, yang mengakibatkan banyak korban di kalangan Ukraina yang berjuang di sisi berlawanan selama waktu yang disebut Perang Ukraina-Soviet.

Uni Soviet setelah Perjanjian Riga, memasukkan neagara ini ke dalam Republik Sosialis Soviet Ukraina sebagai bagian dari Uni Soviet.
Namun pada akhirnya Ukraina menjadi sebuah negara pecahan Uni Soviet yang terletak di Eropa Timur. Dalam bahasa Slavia, Ukraina berarti “daerah perbatasan”. Ukraina berbatasan dengan Rusia di sebelah timur laut; Belarus di utara; Polandia, Slowakia dan Hongaria di barat; Rumania dan Moldavia di barat daya; dan Laut Hitam serta Laut Azov di selatan. Ibu kota dan sekaligus kota terbesar di Ukraina adalah Kiev (Kyiv).[[2]](#footnote-3)

Jejak sejarah bahasa Ukraina bermula pada [988](https://id.wikipedia.org/wiki/988), saat Kepangeranan Kiev masuk Kristen. Teks-teks keagamaan orang-orang Ukraina, termasuk terjemahan Alkitab, tertulis dalam [bahasa Slavik Gerejawi Kuno](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Slavik_Gerejawi_Kuna&action=edit&redlink=1), bahasa yang digunakan misionaris untuk menyebarkan Kristen kepada bangsa Slavik.[[3]](#footnote-4)

Pada abad 13, Ukraina menjadi bagian Lithuania dan pada pembentukan awal bahasa Belorusia menjadi bahasa utama. Bagian tersisa Ukraina diambil alih Polandia selama abad 16 dan bahasa Latin dan Polandia digunakan untuk tujuan resmi.[[4]](#footnote-5)

Bangsa Cossacks kemudian pindah ke Ukraina timur dan selama abad 17, pemimpin mereka, Bohdan Khmelnytsky, mengundang Rusia memberi pertolongan terhadap dominasi Polandia pada 1648. Selama masa pemerintahan Katharina yang Agung, bangsa Cossacks pindah ke perbatasan timur Rusia, namun Ukraina tetap di bawah dominasi Rusia, dan Rusia menganggap bahasa Ukraina sedikit lebih banyak daripada logat bahasa Rusia.

Ketetapan 1876 melarang pencetakan atau pengimporan buku berbahasa Ukraina. Walau begitu, ada kebangkitan kembali puisi dan historiografi bahasa Ukraina selama abad 19. Ukraina menikmati masa pendek kemerdekaan dari 1918 sampai 1919, lalu diambil alih USSR dan mendeklarasikan Republik Uni Soviet. Selama masa Uni Soviet, bahasa Rusia merupakan bahasa utama dan pekerjaan sedangkan bahasa Ukraina terpinggirkan.Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan pada 1991. Sejak saat itu banyak emigran Ukraina telah kembali ke Ukraina, khususnya dari Asia Tengah dan Siberia.

Ukraina secara harfiah berarti “tanah perbatasan”. Negara ini memiliki komposisi suku yang unik. Barat Sungai Dnieper dihuni keturunan Ukraina. Sementara, di timur dan selatan (termasuk Krimea) banyak ditinggali orang keturunan Rusia, yang masih teguh menjalankan budaya serta bahasa tanah leluhur. Meski jumlah warga keturunan Ukraina (70% dari populasi) lebih banyak, keturunan Rusia (17% dari populasi) menganggap dirinya sebagai warga negara kelas satu. Latar belakang suku itu tampaknya membuat warga Krimea tidak sepakat dengan saudara-saudara mereka di Kiev dalam hal penggulingan Yanukovych (presiden keturunan Rusia dan berasal dari Donetsk) dan intervensi militer Rusia. Meski de jure adalah daerah otonomi di bawah pemerintahan Ukraina, secara de facto Krimea “milik” Rusia. Krimea adalah satu satunya daerah di Ukraina dengan penduduk keturunan Rusia mencapai sekitar 60%. Selain lokasi, banyaknya warga keturunan Rusia di Krimea disebabkan faktor sejarah. Bahasa yang di gunakan di Krimea kebanyakan warganya menggunakan bahasa Rusia untuk berkomunikasi antar sesama warga.[[5]](#footnote-6)

Perseteruan kepentingan Barat dan Rusia menjalar hingga ke wilayah Krimea, tepatnya di kota Sevastopol, pangkalan armada angkatan laut Negeri Beruang Merah. Selain 60 persen warganya keturunan Rusia, Krimea juga jadi lokasi strategis tempat ditambatkannya Armada Laut Hitam Rusia. Padahal, sudah 23 tahun Soviet pecah. Hal ini tidak lepas dari sejarah panjang Sevastopol, wilayah Semenanjung Krimea. Kota pelabuhan di Laut Hitam ini ditemukan oleh Kaisar Rusia Yekaterina yang Agung di barat daya pesisir Semenanjung Krimea pada tahun 1783.[[6]](#footnote-7)

Sevastopol saat itu terletak di kota tua Yunani bernama Chersoneus. Reruntuhan kota ini sampai saat ini masih dieksplorasi oleh para arkeolog. Kaisar Yekaterina sendiri yang menamai kota itu Sevastopol, yang berarti "Kota Suci dan Megah". Hal utama yang menarik perhatian Kaisar Yekaterina adalah pelabuhan laut sedalam 30 meter, cocok untuk pangkalan angkatan laut. Saat perang Krimea, penaklukkan Sevastopol antara September 1854-September 1855 menjadi penentu kemenangan konflik. Butuh sekitar setahun bagi Prancis, Inggris dan Kekhalifahan Ottoman menguasai kota ini[[7]](#footnote-8).

Pada Perang Dunia II bertempat di Sevastopol, Tahun 1941-42, pasukan Tentara Merah dan Armada Laut Hitam mempertahankannya dari pasukan Nazi Jerman dalam pertempuran 250 hari, siang dan malam. Pasukan Rusia kalah, namun Jerman juga direpotkan oleh perlawanan dari warga kota. Sejak tahun 1948, Sevastopol mendapatkan status kota istimewa dari pemerintahan Republik Sosialis Federal Soviet Rusia, bagian dari Uni Soviet. Tahun 1954, pemimpin Soviet saat itu Nikita Khrushchev memberikan Sevastopol dan seluruh Krimea kepada Republik Sosialis Soviet Ukraina, juga bagian dari Uni Soviet. Awal 1990an, Ukraina menjadi negara merdeka. Krimea menjadi bagian dari Ukraina. Di bawah Traktat Persahabatan, Kerja Sama dan Kemitraan Moskow-Kiev tahun 1997, Rusia mengakui status kepemilikan Sevastopol dan kedaulatan Ukraina.[[8]](#footnote-9)

Sebagai balasannya, Ukraina memberikan Rusia hak untuk terus menggunakan pelabuhan Sevastopol bagi armada laut mereka sampai tahun 2017. Perjanjian awal izin Armada Laut Hitam di Sevastopol berlangsung untuk 20 tahun. Perjanjian ini otomatis diperpanjang lima tahun kecuali salah satu pihak membatalkannya. Perjanjian kedua, ditandatangani di Kharkiv tahun 2010, memperpanjang penggunaan pelabuhan Sevastopol untuk armada Rusia hingga 2042. Rusia membayar Ukraina US$98 juta per tahun untuk menyewa pangkalan laut di Krimea. Selain itu, berdasarkan perjanjian Kharkiv, Rusia akan memberikan potongan harga gas US$100 per ton[[9]](#footnote-10).

Rusia terpaksa menggunakan pelabuhan Sevastopol karena tidak ada pelabuhan di negaranya yang mampu menampung Armada Laut Hitam. Pelabuhan Rusia di Novorossiysk tidak cukup dalam dan kurang infrastrukturnya. Armada Laut Hitam Rusia terdiri dari 388 kapal perang Rusia, termasuk 14 kapal selam diesel. Selain itu, ada 161 jet tempur di pangkalan udara yang disewa Rusia di Gvardeiskoye (sebelah utara Simferopol) dan Sevastopol.

Total ada 25.000 personel militer Rusia di Krimea, belum termasuk staf sipil. Jika dihitung juga keluarga mereka yang ikut tinggal di komplek militer Krimea, total ada lebih dari 100.000 orang. Pada konflik Ukraina, Rusia memobilisasi 150.000 pasukan, 800 tank dan 90 jet tempur dan 80 kapal perang, untuk bersiap jika diperlukan diturunkan ke Sevastopol. Warga Krimea sendiri khawatir konflik ini akan memecah belah Krimea menjadi dua kubu, pro-Ukraina dan pro-Rusia. Namun warga keturunan Rusia yang jumlahnya mayoritas menyatakan akan mendukung Rusia jika terpaksa memilih.

Aksi protes massa di Kiev dan kota-kota lain di Ukraina yang dimulai sejak 21 November 2013, aksi ini dikenal dengan aksi unjuk rasa Euromaidan merupakan respon atas dibatalkannya penandatanganan perjanjian kerjasama Ukraina dengan Uni Eropa oleh pemerintahan Ukraina saat itu. Pemerintah Ukraina memutuskan tidak menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Uni Eropa di Eastern Partnership Summit di Vilnius, Lituania pada 28-29 November 2013. Pemerintah Ukraina lebih memilih menerima pinjaman dana dari Rusia. Keputusan tersebut memicu aksi protes besar-besaran terhadap pemerintah Ukraina. Para demonstran melancarkan aksi protes di Kiev. Sempat ada upaya pengusiran kemah-kemah yang dihuni para demonstran oleh pihak pemerintah Ukraina[[10]](#footnote-11).

Pada 16 Januari 2014, Parlemen Ukraina (Verkhovnaya Rada) bidang hukum memberi sanksi berat bagi pelaku kerusuhan di Kiev. Hal itu mengundang aksi anti pemerintah yang lebih besar dan berimbas pada penggulingan pemerintahan di Ukraina. Aksi tersebut mengakibatkan 80 warga Ukraina meninggal dan sekitar 700 orang lainnya luka-luka.[[11]](#footnote-12)

Kini, pihak oposisi menduduki pemerintahan dan memegang kuasa atas parlemen Ukraina. Verkhovnaya Rada mengumumkan Aleksander Turchinov sebagai Presiden Ukraina dan Arseniy Yatsenchuk sebagai Perdana Menteri Ukraina yang baru. Sementara itu, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych melarikan diri dari Kiev dan meminta perlindungan Rusia.

Puncak kerusuhan krisis Ukraina terjadi pada tanggal 18 Februari 2014, sekitar 20.000 pengunjuk rasa [Euromaidan](https://id.wikipedia.org/wiki/Euromaidan) di [Kiev](https://id.wikipedia.org/wiki/Kiev) beraksi di [parlemen Ukraina](https://id.wikipedia.org/wiki/Verkhovna_Rada) untuk mendukung pemulihan [Konstitusi Ukraina](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstitusi_Ukraina&action=edit&redlink=1) kembali ke Konstitusi 2004, yang telah diganti oleh Mahkamah Konstitusi Ukraina tak lama setelah [Viktor Yanukovych](https://id.wikipedia.org/wiki/Viktor_Yanukovych) terpilih sebagai presiden pada tahun 2010. Petugas kepolisian dan pengunjuk rasa saling menembakkan senapan, baik senapan [peluru karet](https://id.wikipedia.org/wiki/Peluru_karet) ataupun amunisi, dan petugas kepolisian menggunakan [gas air mata](https://id.wikipedia.org/wiki/Gas_air_mata) dan [granat kilat](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Granat_kilat&action=edit&redlink=1) untuk mengusir ribuan demonstran, yang membalasnya dengan melontarkan batu dan bahan peledak[[12]](#footnote-13).

Bentrokan paling parah terjadi di [Mariinsky Park](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mariinsky_Park&action=edit&redlink=1), [Hrushevskoho Street](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hrushevskoho_Street&action=edit&redlink=1) dan di Institutska Street di dekat Shovkovychna Street. Setidaknya 75 orang tewas dalam bentrokan ini, termasuk 13 polisi; lebih dari 1.100 lainnya cedera. Polisi kemudian menyerbu markas utama pengunjuk rasa di [Maidan Nezalezhnosti](https://id.wikipedia.org/wiki/Maidan_Nezalezhnosti). Sejumlah pengamat politik berpendapat bahwa Ukraina sedang berada di ambang perang saudara.[[13]](#footnote-14)

Tanggal 19 Februari 2014, pemeriksaan polisi, pembatasan transportasi umum, dan penutupan sekolah-sekolah diperintahkan oleh pihak berwenang di Kiev, yang memicu diberlakukannya status [darurat nasional](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Darurat_nasional&action=edit&redlink=1) [de facto](https://id.wikipedia.org/wiki/De_facto). Kedutaan [Britania Raya](https://id.wikipedia.org/wiki/Britania_Raya) di [Kiev](https://id.wikipedia.org/wiki/Kiev) ditutup pada keesokan harinya. Salah seorang anggota parlemen berkata dalam sebuah wawancara bahwa status darurat de facto diberlakukan di seluruh negara setelah lumpuhnya transportasi menuju ibu kota. Pada 20 Februari 2014, Menteri Dalam Negeri [Vitaliy Zakharchenko](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Vitaliy_Zakharchenko&action=edit&redlink=1) mengumumkan bahwa ia telah menandatangani dekrit yang mengizinkan penggunaan [amunisi](https://id.wikipedia.org/wiki/Amunisi) terhadap para demonstran. Keesokan harinya, Pemimpin Verkhovna Rada [Volodymyr Rybak](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Volodymyr_Rybak&action=edit&redlink=1) mengumumkan ia telah menandatangani dekrit parlemen, yang mengutuk penggunaan angkatan bersenjata dan mendesak semua lembaga (Kementerian Dalam Negeri, Menteri Kabinet, dan sebagainya) untuk segera menghentikan seluruh tindakan militer terhadap para demonstran.[[14]](#footnote-15)

Aktor dari aksi kerusuhan dan revolusi Euromaidan serta penggulingan Presiden Ukraina sebelumnya dicetus atau dipelopori oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Batalion Azov. Batalion Azov adalah unit para milisi sayap kanan [neo-Nazi](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Nazism&usg=ALkJrhiOELdI-ILUPVnleHDft9mDVJrbNQ) di Ukraina. Batalion Azov merupakan kumpulan dari para relawan rakyat Ukraina yang kontra akan Rusia. Unit ini berbasis di [Mariupol](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mariupol&usg=ALkJrhhnl3QFubjtOZ0BULPoGsV_OjO-bQ) di [Laut Azov](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Azov_Sea&usg=ALkJrhiLaeKp7EEgEniod3lVaOkvfbUiEQ) wilayah pesisir. Pengalaman tempur pertama dari battalion ini adalah [merebut kembali Mariupol dari pasukan separatis pro-Rusia](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mariupol_%28May%25E2%2580%2593June_2014%29&usg=ALkJrhhFUdPm5p5kZJfjgpP3KzivV0OJtw#Government_recapture_of_Mariupol) pada bulan Juni 2014. Awalnya Batalion Azov adalah milisi sukarelawan, dibentuk pada tanggal 5 Mei 2014 selama [kerusuhan pro-Rusia di Ukraina yang menuntut Krimea untuk melakukan referendum,](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/2014_pro-Russian_unrest_in_Ukraine&usg=ALkJrhhLxGumC21EQrOv4jG-FpQLlOZqvA) Azov sejak itu telah dimasukkan ke dalam pemerintahan dan dipersenjatai oleh Ukraina [Departemen Dalam Negeri.](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Internal_Affairs_%28Ukraine%29&usg=ALkJrhjVtcvdpoy49QUWrfNQqat16KjI6A) Semua anggota unit berada di bawah kontrak [Garda Nasional Ukraina](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/National_Guard_of_Ukraine&usg=ALkJrhjlx1_QCcxyoBnyBoGX62pmYnN1Jw).[[15]](#footnote-16)

Revolusi tidak hanya menghancurkan mantan Presiden Yanukovych, tetapi juga lembaga-lembaga negara Ukraina yang lemah. Revolusi juga memperburuk pertentangan antara kubu barat dan timur Ukraina. Pemilihan presiden yang dilaksanakan lebih cepat yakni pada bulan Mei mungkin tidak dapat membantu menstabilkan situasi. “Saya tak bisa membayangkan bagaimana pemenang pemilihan presiden akan diakui di seluruh negeri dalam keadaan seperti itu. Jika pemenangnya wakil dari Timur, Barat tidak akan menerimanya. Begitu pula sebaliknya,” kata Konstantin Zatulin, Direktur Institut Persemakmuran Negara-negara Merdeka.[[16]](#footnote-17)

Sejak awal Moskow telah mengambil posisi yang jelas terkait konflik di Ukraina. Rusia secara ketat mengandalkan prinsip-prinsip hukum internasional dan mengingatkan bahwa di negara demokratis sikap masyarakat terhadap otoritas harus dinyatakan melalui kotak suara, bukan dengan bom Molotov. Rusia juga tidak percaya pada kelangsungan hidup Ukraina pasca Revolusi, terutama jika golongan ultranasionalis Ukraina yang mengirim militan untuk aksi di Maidan akan mendapat bagian dalam pemerintahan.[[17]](#footnote-18)

Moskow tidak sabar menanti “reformasi” elit Ukraina, tetapi saat ini Rusia harus mempertahankan kepentingannya terhadap Ukraina. Oleh karena itu, Rusia memutuskan untuk menahan isu jumlah pinjaman baru untuk Ukraina setidaknya sampai terbentuknya otoritas baru yang sah di negara itu. “Situasi politik telah berubah, maka kami perlu memahami pemerintah macam apa yang akan bekerjasama dengan kami. Kami akan menunggu kemunculan pemerintahan baru Ukrainia dan memahami kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baru tersebut, setelah itu baru kami akan menentukan keputusan,” kata Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov.

Konflik Krimea ini bermula dari tergulingnya Viktor Yanukovich dari kursi presiden Ukraina. Rakyat Ukraina menggelar demo besar-besaran setelah Yanukovich membatalkan kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa dan beralih ke Rusia. Yanukovich terguling dan terbang ke Rusia.

Krimea yang mayoritas penduduknya berlatar belakang Rusia `berontak`. Mereka ingin memisahkan diri. Referendum digelar pada 16 Maret dan hasilnya Krimea memutuskan berpisah dengan Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Tentara Rusia sebelumnya juga dkerahkan ke Krimea. Ukraina menyebut aksi Rusia itu sebagai aneksasi atau pencaplokan wilayah.

Jatuhnya Viktor Yanukovych dari kursi kepresidenan Ukraina sebagai akibat dari krisis politik yang terjadi sejak akhir tahun lalu di negara tersebut, telah berkembang menjadi krisis bilateral Rusia-Ukraina, dan bukan tidak mungkin akan berkembang lebih jauh lagi dengan melibatkan aktor-aktor global lainnya, termasuk Uni Eropa dan NATO.

Ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat berkenaan dengan Ukraina sejatinya bukan merupakan hal baru. Sepuluh tahun lalu, pada pengujung tahun 2004, ketegangan serupa juga nyaris muncul bersamaan dengan terjadinya ”Revolusi Oranye” yang membawa kelompok pro-Eropa Barat pimpinan Viktor Yushchenko dan Yulia Tymoshenko mengungguli kelompok pro-Rusia pimpinan Yanukovych.[[18]](#footnote-19)

Segera setelah Yushchenko menjabat sebagai presiden Ukraina, semangat untuk membawa Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO dikumandangkan. Namun setelah sepuluh tahun berlalu, cita-cita ”Revolusi Oranye” belum juga dapat dipenuhi. Konflik internal yang terjadi di dalam tubuh kelompok pro-Eropa Barat membawa Yanukovych dan kelompok pro-Rusia kembali ke panggung politik Ukraina, hanya dua tahun setelah terjadinya ”Revolusi Oranye” dan otomatis kembali mengubah halauan kebijakan luar negeri Ukraina.

Selain disebabkan perpecahan pada level internal, belum berhasilnya Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO juga disebabkan oleh kuatnya resistensi Rusia. Ukraina dan negara-negara pecahan Uni Soviet merupakan wilayah vital bagi Rusia.

Sebagaimana disebutkan di dalam Konsepsi Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia tahun 2013, upaya untuk membangun kemitraan dengan negara-negara pecahan Uni Soviet yang tergabung di dalam Commonwealth of Independent States(CIS) dalam wilayah ekonomi maupun politik dan keamanan merupakan salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Rusia.

Secara khusus, dokumen tersebut menyebutkan keinginan Rusia untuk melibatkan Ukraina dalam proses integrasi ekonomi Eurasia seiring dengan gagasan besar Rusia untuk membentuk Eurasian Economic Union. Dalam wilayah politik dan keamanan, Ukraina dan negara-negara pecahan Uni Soviet merupakan salah satu poros utama kebijakan luar negeri dan keamanan Rusia. Sudah sejak lama Rusia menentang keras upaya Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO.

Bagi Rusia, keberadaan kekuatan militer NATO dan Uni Eropa di negara yang berbatasan langsung dengannya merupakan sebuah ancaman langsung bagi keamanan nasional Rusia. Tidak jarang penolakan ini disampaikan secara keras, seperti ancaman Rusia pada Februari 2008 untuk mengarahkan rudalnya ke Ukraina jika negara itu memaksa bergabung dengan NATO dan menyetujui permintaan Amerika Serikat (saat itu) untuk menempatkan perisai rudalnya di kawasan Eropa.

Kondisi yang saat ini tengah berkembang di Krimea dikhawatirkan oleh masyarakat internasional akan berkembang ke arah konflik yang mengkhawatirkan. Hal ini diperkuat oleh preseden dalam konflik nyaris serupa yang menyeret Rusia dan Georgia ke dalam ”Perang 5 Hari” pada Agustus 2008.

Perang Rusia-Georgia pada tahun 2008 dipicu oleh upaya warga etnis Rusia di wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia untuk melepaskan diri dari Georgia yang kala itu juga dipimpin oleh rezim pro-Eropa Barat.

Upaya pemerintah Georgia untuk meredam aksi separatisme tersebut kemudian menjadi pemicu keterlibatan Rusia hingga pada terjadinya perang . Justifikasi yang digunakan oleh Rusia kala itu adalah kewajiban mereka untuk melindungi warga etnis Rusia di Ossetia Selatan dan Abkhazia yang terancam keselamatannya akibat tindakan pemerintah Georgia. Justifikasi yang sama sudah disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam merespons perkembangan situasi di Krimea.[[19]](#footnote-20)

Persetujuan Parlemen Rusia atas kebijakan Putin untuk mengerahkan pasukan ke Krimea untuk melindungi warga etnis Rusia yang menolak pemerintahan baru Ukraina, dikhawatirkan akan mengarah pada kondisi yang sebelumnya terjadi di Georgia.

Tekanan dan ancaman sanksi yang disampaikan oleh Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri John F Kerry serta kecaman dari negara-negara anggota NATO atas tindakan Rusia, diragukan akan dapat berpengaruh banyak bagi langkah Rusia.

Ancaman sanksi berupa pembekuan keanggotaan Rusia di G-8 dan embargo ekonomi tidak akan berjalan efektif jika tidak dilakukan juga oleh negara-negara Eropa. Hingga saat ini masih terdapat keraguan pada beberapa negara Eropa mengenai dampak dari meluasnya konflik di Krimea. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Rusia adalah pemasok utama kebutuhan gas alam bagi negara-negara Eropa.

Gas alam dari Rusia dialirkan ke Eropa melalui dua belas pipa gas utama, di mana lima di antaranya dialirkan melalui Ukraina. Penghentian pasokan gas oleh Rusia melalui Ukraina yang sebelumnya pernah terjadi pada 2006 dan 2009 telah membuktikan bagaimana vitalnya pasokan gas dari Rusia bagi negaranegara Eropa. Beberapa negara utama Uni Eropa seperti Jerman dan Italia, juga telah sejak lama dikenal sebagai mitra strategis Rusia.

Berdasarkan pada kondisi itu, langkah mediasi menjadi upaya paling logis yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional. NATO berada dalam posisi sulit untuk dapat memenuhi permintaan dukungan dan perlindungan militer yang disampaikan oleh pemerintah Ukraina, karena Ukraina hingga kini belum menjadi anggota NATO.

Kondisi yang tidak mudah juga dialami oleh Amerika Serikat yang sejak tahun lalu telah secara penuh menggeser fokus kebijakan luar negeri dan keamanannya ke kawasan Asia Timur. Selain itu, hubungan Amerika Serikat- Rusia juga sebenarnya tengah berada dalam kondisi yang kondusif pasca kebijakan reset dalam penataan hubungan bilateral kedua negara yang melahirkan perjanjian New START (Strategic Arms Reduction Treaty) yang ditandatangani pada April 2010.[[20]](#footnote-21)

Memahami dinamika politik merupakan suatu keharusan untuk dapat memahami perkembangan suatu Negara dalam kancah perpolitikan dunia, memahami dinamisasi politik suatu Negara akan membuka jalan untuk dapat memhami bidang lain seperti ekonomi dan pertahanan keamanan Negara tersebut. Akan tetapi tidak dapat di elakan bahwa suatu konflik pasti akan terjadi dalam dinamika politik suatu Negara, apapun pemicunya konflik dan perebutan kekuasaan pasti akan mewarnai dinamisasi politik Negara itu.

Seperti halnya Negara Ukraina yang pada saat ini sentar di beritakan mengenai konflik berkepanjangan yang tengah terjadi di Negara tersebut, selain konflik dengan rusia mengenai permasalahan Krimea terjadi pula pertempuran di dalam Negara tersebut, contohnya pertempuran baru yang terjadi di Ukraina timur dimana pertempuran tersebut merupakan pemberontakan pro Rusia, mereka menyerang pos perbatasan militer Ukraina di Lugansk. Namun pasukan pemerintah berhasil memukul mundur penyerang yang sebagian berasal dari Cechnya., seperti yang di beritakan oleh salah satu media bukan hanya pertempuran yang di lakukan oleh warga pro rusia namun terjadi pertempuran baru juga pecah di kota Slavyansk yang sampai saat ini dikuasai kubu separatis.

Menurut keterangan pemerintah Ukraina, para pemberontak mengalami kerugian besar dalam serangan yang dilancarkan militer. Kubu pemberontak sebaliknya melaporkan, mereka berhasil menembak jatuh sebuah pesawat dan sebuah helikopter tempur. Minggu yang lalu, pemberontak menembak jatuh sebuah helikopter Ukraina dan menewaskan 14 serdadu, termasuk seorang jendral militer.

Berbagai sumber melaporkan, banyak serdadu bayaran dari Cechnya yang menerobos ke Ukraina untuk mendukung kelompok separatis. Mereka membawa persenjataan berat dan rata-rata punya ketrampilan tinggi di medan pertempuran.
Begitu banyak permaslahan yang dialami dan harus di hadapi Ukraina untuk dapat menyeimbangkan dalam segala aspek, baik ekonomi, pertahanan,keamanan dan lain sebagainya.

Karena diketahui ukraina mengalami kemerosotan di dalam bidang ekonomi akibat konflik dan permasalahan- permaslahan yang terjadi bukan hanya berpengaruh terhadap perekonomian ukraina sendiri akan tetapi mempengaruhi ekonomi global.

Terkait dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut dengan mengangkatnya pada judul skripsi : **PENGARUH KONFLIK UKRAINA TERHADAP BERGABUNGNYA KRIMEA PADA FEDERASI RUSIA.**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, diajukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konflik Ukraina mempengaruhi relasi antara Amerika Serikat,dan Ukraina terhadap Rusia?
2. Bagaimana Referendum Krimea berdasarkan pandangan Hukum Internasional?
3. Bagaimana dampak bergabungnya Krimea pada Rusia dalam peta politik Internasional?

**1.2.1. Pembatasan Masalah**

Mengingat masalah yang akan dipaparkan sangat luas maka dalam penganalisaanya penulis membatasi masalah berdasarkan perspektif kebijakan Rusia dalam intervensi nya terhadap konflik Ukraina yang berkaitan dengan bergabungnya Krimea pada Federasi Rusia dan bagaimana peran Amerika Serikat,dan Ukraina yang kontra akan kebijakan Rusia merespon fenomena konflik Ukraina.

**1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah maka,dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana peran Federasi Rusia dalam konflik yang terjadi di Ukraina serta tanggapan Amerika Serikat dan Ukraina terhadap bergabungnya Krimea pada Federasi Rusia?”

**1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

* + 1. **Tujuan Penelitian**

Selain tujuan–tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini pun memiliki kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai relasi Amerika Serikat dan Rusia pasca Konflik Ukraina.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Internasional mengenai Referendum Krimea.
3. Untuk mengetahui potensi apa yang dapat diberikan Krimea terhadap Rusia pasca bergabungnya Krimea.
	* 1. **Kegunaan Penelitian**
4. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang berbagai aspek yang saling berkaitan dalam bidang konflik internasional, dan khususnya mengenai aspek benturan negara Superor Amerika Serikat, Uni eropa dan PBB terhadap Rusia yang terpicu oleh konflik Ukraina.
5. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada disiplin ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai peran serta aktor *state* dalam merespon konflik global.
6. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dan melaksanakan penelitian yang berpedoman pada metode dan teknik yang bersifat ilmiah. Sekaligus mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh penulis selama belajar di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan.
	1. **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**
		1. **Kerangka Pemikiran**

Sebagai pedoman untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian, penulis mengemukakan teori – teori dan konsep – konsep dari para ahi Hubungan Internasional.

Hubungan Internasional dipelajari adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara – negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Negara – negara merdeka satu sama lain, paling tidak secara hukum mereka memiliki kedaulatan. Tetapi hal itu tidak berarti mereka terasing atau terpisah satu sama lain. Sebaliknya, mereka berdekatan dan mempengaruhi satu sama lain. Mereka biasanya berhubungan dalam pasar internasional yang mempengaruhi kebijakan pemerintahannya dan kekayaan serta kesejahteraan warga negaranya. Hal itu menujukan bahwa mereka berhubungan satu sama lain.

Kerangka berfikir ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang oleh pendapat para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu itu penulis akan menggunakan teori–teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikan pedoman dalam objek penelitian.

Kredibilitas dari hasil suatu penelitian dapat dilihat dari sejauh mana kemampuan perangkat–perangkat ilmiah terhadap objek penelitian, seperti penggunaan pendekatan ilmiah, penetapan anggapan dasar, serta kerangka konseptual yang digunakan untuk mengarahkan penelitian yang dimaksud.

Untuk lebih memahami dan mempermudah proses penelitian, penulis menggunakan beberapa pendekatan teoritis serta pendapat para ahli yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teori–teori dan pendapat tersebut akan digunakan sebagai landasan berpijak bagi peneliti dalam mengemukakan kerangka pemikiran, dan diharapkan tidak jauh dari sifat–sifat ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka berfikir deduktif dengan kerangka konseptual, agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam *scope* Hubungan Internasional.

Penulis mencoba untuk mengutip teori atau pendekatan para ahli yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti dan disimpulkan pada kerangka pemikiran yang mana tindakan ini dimaksudkan untuk memberi pondasi teoritis yang pada akhirnya akan dapat membantu dalam memformulasikan hipotesis, dimana hal ini dianggap penting karena teori-teori tersebut digunakan untuk dapat memahami fenomena-fenomena dalam hubungan internasional. Sehingga penulis mengambil beberapa pendapat yang dapat disajikan sebagai panduan dan acuan dalam menyusun skripsi ini.[[21]](#footnote-22)

Kerangka pemikiran ini merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang terdapat antar berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk konstelasi permasalahannya, juga merupakan kajian teoritis berdasarkan pengujian secara empiris terhadap kesimpulan analisis teoritis.

Sebagai landasan awal,penulis memberikan pendekatan mengenai definisi dari sebuah Negara. Hal ini didasari bahwa setiap aktivitas Internasional tentunya berkaitan dengan sebuah Negara. Menurut **G.Pringgodigdo,SH.** memberi paparan bahwa :

**“Negara adalah organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang memenuhi persyaratan tertentu,yaitu harus ada: Pemerintah yang berdaulat,wilayah tertentu dan rakyat yang hidup teratur sehingga membentuk suatu bangsa.”[[22]](#footnote-23)**

Eksistensi ataupun keberadaan Negara tak lepas dari esensi sebuah Kedaulatan atau yang lebih dikenal dengan Kedaulatan Negara. Prinsip sederhananya dapat diartikan jika ada sebuah negara tentu negara tersebut memiliki kedaulatan. **T.May Rudy** menegaskan:

**“Kedaulatan negara diartikan bahwa negara tersebut talah memiliki kemerdekaan dan adanya kedaulatan terhadap warga-warga negaranya dalam urusan-urusan kenegaraan serta penjelasan dalam batas-batas wilayah teritorialnya. Pengertian kedaulatan mengalami penyempitan makna yang pada awalnya kedaulatan haknya dimiliki oleh negara-negara merdeka yang ditandai dengan munculnya negara-negara nasionalis yang hanya mengenal kedaulatan dalam pembatasan-pembatasan terhadap ekonomi negara yang telah berkembang menuju tidak adanya pembatasa-pembatasan yang dikenakan terhadap kebebasan bertindaknya, Sehingga kedaulatan suatu negara dianggap sebagai sisa (residiuun) dari kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam batas-batas yang di tetapkan oleh hukum internasional.”**

Selain itu T May Rudy, mengungkapkan suatu kedaulatan teritorial sebagai salah satu unsur esensial dari negara yakni penguasaan suatu daerah teritorial, dimana terdapat hukum yang beroperasi atas wilayah teritorialnya sehingga wewenang tertinggi atas kekuasaan teritorialnya berada pada negara tersebut. Kedaulatan teritorial berarti bahwa di kawasan tersebut yuridiksi atau aturan hukum yang berlaku ditentukan oleh negara tersebut atas orang (warga negaranya) dan harta benda (Sumber daya alam) yang terkandung didalamnya. Sehinnga dijelaskan cara-cara memperoleh kedaulatan teritorial, diantaranya pendudukan (occupation), penaklukan (annexation), akresi (accretion), sesi (cession), preskripsi (prescription), Integrasi (integration), Revolusi (revolution).

**a)**   **Pendudukan (Occupation)**

Proses pendudukan ialah proses penegakan kedaulatan atas wilayah yang bukan di bawah wewenang negara lain, kondisi atas kedaulatan suatu wilayah dalam proses pendudukan dapat diketahui ketika dalam kondisi tertentu, seperti wilayah tersebut baru ditemukan, ataupun proses peninggalan oleh negara yang sebelumnya menguasai kawasan tersebut.

Proses pendudukan menentukan sejauh mana wilayah tersebut dikuasai. Oleh karena itu terdapat beberapa teori yang berhubungan dengan pengakuan kedaulatan dalam hubungan pernyataan klaim beberapa negara dalam suatu wilayah tertentu, diantaranya:

1. Teori Kontinuitas *(continuity),* dimana suatu tindakan pendudukan di suatu wilayah memperpanjang kedaulatan negara yang menduduki sejauh diperlukan untuk keamanan atau pengembangan alam wilayah yang di klaim tersebut.
2. Teori Hubungan *(contiguity),* dimana kedaulatan negara yang menduduki itu mencapai wilayah-wilayah yang berdekatan secara geografis dan tentunya berhubungan dengan wilayah yang di klaim tersebut.

**b) Aneksasi**

Aneksasi adalah suatu metode memperoleh kedaulatan teritorial yang digunakan dalam dua perangkat keadaan

1.      Dimana wilayah yang dianeksasi itu telah ditaklukan oleh negara yang menganeksasi.

2.      Dimana wilayah yang dianeksasi itu benar-benar berada dalam posisi lebih rendah dari pada negara penganeksasi pada waktu pengumuman maksud negara penganeksasi.

**c) Akresi**

Hak kedaulatan atas prinsip akresi terjadi apabila suatu negara bertambah wilayahnya, karena faktor-faktor perubahan alam (melalui sebab-sebab alamiah) yang mungkin terjadi oleh pelebaran aliran sungai atau faktor alam lain ke wilayah yang telah berada di bawah kedaulatan negara yang memperolah kedaulatan tersebut.

**d) Sesi**

Sesi (penyerahan) merupakan suatu metoda penting untuk memperoleh kedaulatan teritorial. Metode ini bersandar pada prinsip bahwa hak mengalihkan teritorialnya memiliki sifat fundamental dari kedaulatan suatu negara.

**e) Preskripsi**

Hak dengan preskripsi (preskripsi akuistif) adalah hasil pelaksanaan kedaulatan de facto secara damai untuk jangka yang relatif lama atas wilayah yang tunduk pada kedaulatan negara yang lainnya.

**f) Integrasi**

Proses integrasi merupakan penggambungan sebuah wilayah ke dalam suatu negara yang mana biasanya negara yang akan diajak bergabung atau berintegrasi tersebut lokasi dan letaknya berdekatan dengan wilayah yang akan berintegrasi tersebut.

Tujuan untuk mengadakan proses integrasi ini untuk memudahkan antar wilayah yang akan berintegrasi dengan negara yang berintegrasi yang biasanya merupakan sebuah wilayah yang pernah dijajah dan berada dalam kondisi yang ditelantarkan/dibiarkan oleh negara penjajahnya. Oleh karena ditelantarkan maka wilayah tersebut menuntut untuk memerdekakan diri dan membentuk pemerintahan sendiri, tetapi karena kurangnya fasilitas maupun sumber daya manusia, maka negara atau wilayah tersebut berintegrasi dengan wilayah atau negara yang berada di dekatnya untuk mendapatkan bantuan dan sebagai akibatnya wilayah tersebut akan menjadi bagian dari negara yang diajak berintegrasi.

**g)Revolusi**

Sebuah negara independen merupakan sebuah negara yag berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari negara lain maupun campur tangan dari pihak lain. Negara Independen biasanya mendapatkan kemerdekaanya dari tangan penjajah melalui revolusi atau perjuangan untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah penjajahnya untuk mendirikan sebuah negara baru walaupun tidak diakui oleh negara penjajahnya.

Dalam memperoleh kedaulatan dalam suatu negara yang memegang kekuasaan tertinggi suatu negara, maka dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Kekuasaan yang terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut.
2. Terdapat sebuah kekuasaan yang yang berakhir dimana terdapat kekuasaan negara lain yang memulai berkuasa di wilayah tersebut.

Dalam perkembangan konteporer cara pengakuan kedaulatan teritorial wilayah dapat dilakukan melalui Suatu keputusan Konvensi negara-negara, hal ini biasanya dilakukan di dalam sutu konvensi negara-negara yang menang pada akhir suatu perang, menyerahkan wilayah kepada suatu negara mengingat suatu penyelesaian perdamaian umum. Terdapat pula beberapa tahapan penyelesaian pengakuan kedaulatan teritorial wilayah, antara lain.

1. Wilayah diperoleh suatu negara karena penentuan perbatasan yang dilakukan oleh suatu komisi demarkasi campuran, atau dihadiahkan *ex aequo et bono* oleh suatu pengadilan arbitral yang menangani suatu perselisihan perbatasan
2. Pemberian hak-hak teritorial kepada suatu negara berdasarkan suatu traktat antara negara ini dan suatu suku atau komunitas pribumi, yang sebelumnya menduduki wilayah yang bersangkutan.
3. Pengakuan yang lama dan berkesinambungan oleh negara-negara lain terhadap kedaulatan teritorial suatu negara, walaupun ada ketidakjelasan dan keraguan tentang lahirnya klaim negara itu, sebagai pihak yang berhak
4. Suksesi suatu negara baru atas wilayah negara pendahulunya.
5. Wilayah dibagikan sebagai akibat dari suatu traktat kompromi atau penyelesaian berkenaan dengan bekas tanah sengketa.[[23]](#footnote-24)

Dalam dewasa ini, perkembangan peradaban negara didunia didominasi oleh paham kebebasan yang lebih dikenal dengan sebutan Demokrasi. Mayoritas dari seluruh negara yang berada didunia mengadopsi paham dan sistem Demokrasi. Kata Demokrasi ini berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Demokrasi memiliki arti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan penting yang sangat menentukan. Filusuf dari Yunani, yaitu **Aristoteles** berpendapat:

**“Demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.”[[24]](#footnote-25)**

 Untuk memahani pengertian Hubungan Internasional, maka penulis mengambil pengertian dari **Suwardi Wiraatmaja** dalam bukunya *Pengantar Hubungan Internasional* sebagai berikut :

**“Hubungan Internasional adalah kajian yang mempelajari berbagai fenomena yang melintas batas negara yang dilakukan oleh apa yang disebut *state* actor dan non-state actor yang meliputi individu, bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuasaan, tekanan-tekanan proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir manusia.”[[25]](#footnote-26)**

 Terkait dengan ini juga **Jon Herz**, mendefinisikan bahwa hubungan internasional memiliki arti dan peran yang berbeda,seperti berikut:

**“Hubungan internasional adalah sebuah paham keilmuan yang mengidentifikasikan hubungan internasional sebagai konsep yang membahas tentang kebijakan luar negeri yang lebih mementingkan keamanan yang menjadi pusat perhatian semua rakyatnya.”[[26]](#footnote-27)**

Secara jelas, pengertian tersebut mengartikan hubungan internasional sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Serta berbagai respon perilaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah termasuk komponen-konponennya. Interaksi yang dilakukan tersebut tentu akan sangat berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, konflik, budaya dan interaksi lainnya diantara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara.

Selanjutnya aktivitas dan interaksi yang terjadi dalam ruang lingkup Hubungan Internasional dikenal dengan istilah Politik Luar Negeri. Politik Luar Negeri adalah sebuah simbolisasi bahwa adanya aktivitas Internasional yang terjadi dalam ruang lingkup Hubungan Internasional yang bersifat global. Para ahli seperti Plano dan Olton berpendapat bahwa :

**“Pengertian Politik Luar Negeri adalah gagasan yang menegaskan bahwa politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unik politik internasional yang lainnya untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan Politik Luar Negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan politik luar negeri tersebut menggambarkan tentang masa depan suatu negara yang diawali dari penetapan kebijakan dan keputusan yang didasarkan kepada kepentingan nasional”[[27]](#footnote-28)**

Kemudian dalam Politik Luar Negeri terdapat Kepentingan Nasional, yang eksistensinya tidak akan terlepas dalam Hubungan Internasional. Definisi kepentingan nasional pertamakali diperkenalkan oleh **Hans Morgenthau** yang pendekatannya menggunakan konsep Realisme, sebagai berikut:

 “**Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (survival) dalam politik internasional.”[[28]](#footnote-29)**

Dalam perkembangan interaksi dunia Hubungan Internasional yang mengkedepankan Kepentingan Nasional, kerapkali terjadi gesekan kepentingan yang lebih dikenal dengan istilah Konflik Internasional ataupun Krisis Internasional. Secara lebih dalam memahaminya dari sisi Historis pertikaian ataupun konflik yang terjadi antara negara seringkali muncul dalam dunia Internasional dan tak terhindarkan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor,namun pengertian dari Konflik Internasional telah dipaparkan oleh beberapa ahli seperti **Karl Marx** yang mendeskripsikan bahwa:

 **“Menurut teori konflik, potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang pekonomian, dan konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik. Segi-segi pemikiran filosofis Marx berpusat pada usaha untuk membuka kedok sistem nilai masyarakat, pola kepercayaan dan bentuk kesadaran sebagai ideologi yang mencerminkan dan memperkuat kepentingan kelas yang berkuasa. Meskipun dalam pandangannya, orientasi budaya tidak seluruhnya ditentukan oleh struktur kelas ekonomi, orientasi tersebut sangat dipengaruhi dan dipaksa oleh struktur tersebut. Pentingnya kondisi materil terlihat dalam struktur masyarakat, membatasi pengaruh budaya terhadap kesadaran individu para pelakunya. Terdapat beberapa segi kenyataan sosial yang Marx tekankan, yang tidak dapat diabaikan oleh teori apa pun yaitu antara lain adalah, pengakuan terhadap adanya struktur kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan diantara orang-orang dalam kelas berbeda, pengaruh yang besar dari posisi kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang serta bentuk kesadaran dan berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan struktur sosial, merupakan sesuatu hal yang sangat penting.”[[29]](#footnote-30)**

Jika merujuk pada konflik yang terjadi di kawasan Ukraina posisi negara Rusia, Ukraina dan Amerika Serikat tidak mengalami konflik langsung namun, pihak yang mengalami konflik langsung secara fisik adalah para militansi dan pihak separatis. Hal ini dapat disimpulkan telah adanya Perang Proksi atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Proxy War.* **Chris Loveman,** dalam bukunya *Assessing the Phenomeon of Proxy Intervention* memaparkan :

**“Perang proksi adalah perang yang terjadi ketika lawan kekuatan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti berkelahi satu sama lain secara langsung. Sementara kekuasaan kadang-kadang digunakan pemerintah sebagai proksi, aktor non-negara kekerasan, dan** [**tentara bayaran**](https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_bayaran)**, pihak ketiga lainnya yang lebih sering digunakan. Diharapkan bahwa kelompok-kelompok ini bisa menyerang lawan tanpa menyebabkan perang skala penuh. Perang Proksi juga telah berjuang bersama konflik skala penuh. Hal ini hampir mustahil untuk memiliki perang proksi yang murni, sebagai kelompok berjuang untuk bangsa tertentu biasanya memiliki kepentingan mereka sendiri, yang dapat menyimpang dari orang-orang dari patron mereka. Biasanya perang proksi berfungsi terbaik selama perang dingin, karena mereka menjadi kebutuhan dalam melakukan konflik bersenjata antara setidaknya dua pihak yang berperang sambil terus perang dingin.”[[30]](#footnote-31)**

Paparan teori diatas tentunya memiliki sinergi atas apa yang sedang terjadi pada konflik Ukraina saat ini. Krisis Ukraina tentunya menjadi perbincangan global yang menarik untuk diteliti dari perspektif dunia Hubungan Internasional Terlebih lagi adanya intervensi dari salah satu negara superior yang secara geografis berbatasan langsung dengan Ukraina,yakni Rusia. Selain itu, kecaman dari pihak Perserikatan bangsa-bangsa, Uni Eropa dan Amerika Serikat menambah unsur drama yang terjadi. Pengaruh konflik ini juga mengakibatkan kawasan Krimea memilih bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia melalui jalur Referendum Internasional. Tentunya ada pertikaian pihak Pro dan Kontra dalam menanggapi Referendum Krimea tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dari tiap negara.

Menyangkut bergabungnya Krimea pada Federasi Rusia, penulis merasa perlu memberi gambaran teori mengenai Negara Federasi. **K.C.Wheare** ,berpendapat :

 “**Pengertian negara federasi adalah negara dimana kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang bidang tertentu bebas satu sama lain.”[[31]](#footnote-32)**

 Jika melihat kasus yang terjadi pada penulisan karya tulis ini. Tentunya akan merujuk pada sebuah konflik yang terjadi pada suatu negara berdaulat yang dimana Ukraina dalam konfliknya mendapatkan intervensi dari pihak lain atau negara lain yaitu Rusia. intervensi adalah bagian dari politik suatu negara terhadap negara lain dengan cara melakukan campur tangan dalam perselisihan antar negara sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau meningkatkan nilai sosial di luar negeri melalui berbagai kegiatan di bidang politik, ekonomi, maupun militer. Intervensi merupakan suatu akibat dari kemelut.[[32]](#footnote-33) Menurut **Parry** dan **Grant :**

 **“Intervensi adalah ikut campur suatu negara secara diktator dalam kaitannya dengan negara lain dengan tujuan untuk menjaga atau mengubah kondisi aktual tertentu.”[[33]](#footnote-34)**

 Intervensi Rusia atas konflik Ukraina telah mengakibatkan bergabungya Krimea pada Federasi Rusia melalui jalur Referendum. Referendum merupakan salah satu bentuk demokrasi dalam sebuah negara. Referendum merupakan pemberian hak kepada rakyat, untuk memilih solusi dalam penyelesaian sebuah perkara domestik. Perbedaan dengan pemilihan umum adalah, pemilihan umum secara umum bertujuan untuk memilih perwakilan rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden), sedangkan dalam referendum, memungut suara demi mencari solusi yang diinginkan oleh rakyat dalam penyelesaian sebuah perkara.

Rakyat diberikan pilihan ‘iya’ atau ‘tidak’ mengenai sebuah proposal, yang nantinya akan menentukan kebijakan apa yang rakyat merasa butuh untuk dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan. Persyaratan yang dibutuhkan agar bisa memilih dalam sebuah referendum itu sama dengan persyaratan yang diaplikasikan dalam pemilihan umum. Diantaranya, merupakan warga negara tempat referendum berlangsung, serta berumur minimal 18 tahun (umur relatif pada negara yang menjadi obyek).

Hak untuk melaksanakan sebuah referendum telah diakui oleh hukum internasional. Dimana hak melaksanakan referendum merupakan bagian dari kedaulatan negara. Sebuah negara yang belum merdeka juga punya hak untuk mengadakan referendum dalam negaranya, dan tidak ada konstitusi domestik yang dapat menghapus hak referendum tersebut. Sebab referendum berkaitan dengan hak partisipasi politik rakyat, dalam menentukan arah kebijakan di masa yang akan mendatang.

Demokrasi mengutamakan suara rakyat, sehingga sangat penting sebuah negara melaksanakan referendum. Berkurangnya reputasi, serta kepercayaan rakyat akan sebuah pemerintahan biasa dilatar belakangi oleh kesalahan pemerintah dalam menyikapi sebuah kasus domestik yang sedang dialami negara tersebut menjadi salah satu alasan negara mengadakan referendum. Perubahan yang tidak signifikan juga melatar belakangi diadakannya sebuah referendum.

Rakyat dipercayakan untuk memberikan suaranya sebab dalam menghadapi sebuah masalah domestik, entah itu perubahan konstitusi, hukum, ataupun kebijakan, rakyat adalah aktor yang akan mendapatkan pengaruh paling besar dalam kebijakan tersebut. Mekanisme referendum efektif dalam menyuarakan apa aspirasi rakyat yang sesungguhnya, sebab pemilihan ini akan langsung diberikan kepada rakyat, tanpa ada mekanisme perwakilan yang mendahului proses referendum tersebut.

Pengawasan proses referendum akan bergantung pada negara yang menjalani proses tersebut. Di berbagai negara dunia ketiga yang telah mengadakan referendum, diamati oleh berbagai organisasi regional, dan international. Untuk memastikan bahwa suara tersebut murni dari rakyat, dan benar-benara berasal dari aspirasi mereka mengenai perkara yang sedang dihadapi negara.[[34]](#footnote-35)

Beberapa figur Internasional yang merepresentasikan negaranya masing-masing pun sudah mengambil pendapat akan konflik yang terjadi di Ukraina terlebih lagi mengenai referendum Krimea. Perdana Mentri Ukraina pasca Revolusi Euro Maidan, **Arseniy Yatsenyuk** berpendapat:

 **"Setiap keputusan yang Anda ambil merupakan tindakan melawan hukum dan inkonstitusional. Tidak ada orang beradab di dunia ini yang mau mengakui keputusan referendum tersebut yang disebu-sebut sebagai otoritas Krimea,"[[35]](#footnote-36)**

Tak jauh berbeda akan pendapat diatas,pihak Amerika Serikat melalui Juru Bicara Kepresidenan dan White House, **Jay Carney** menyampaikan :

 **“Washington tidak akan mengakui hasil referendum Krimea itu dan menggambarkan aksi Rusia di kawasan itu sangat berbahaya dan mengganggu stabilitas politik kawasan.”[[36]](#footnote-37)**

Sementara dari pihak Rusia,Presiden **Vladimir Putin** secara resmi menyampaikan pendapatnya akan Referendum Krimea. Vladimir Putin menyampaikan :

 **“Bahwa situasi di Ukraina telah berkembang sedemikian rupa bahwa kita harus mulai berusaha agar Krimea menjadi bagian dari Rusia lagi.Rusia tidak bisa meninggalkan wilayah itu dan orang-orang yang tinggal di sana, tidak bisa hanya membuang mereka di bawah buldoser nasionalis ini.*"[[37]](#footnote-38)***

 **“Referendum Krimea sesuai dengan hukum internasional dan deklarasi PBB.”[[38]](#footnote-39)**

* + 1. **Hipotesis**

“Jika bergabungnya Krimea kedalam bagian Federasi Rusia berdasar pada kepentingan Rusia atas Ekonomi, Militer, dan Geopolitik di Krimea maka, akan mengancam kedaulatan Ukraina dan menggangu Superiortias Amerika Serikat dalam penanganan konflik dan pengaruhnya di kawasan Eropa Timur”

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel Dalam Hipotesis****(Teoritis)** | **Indikator (Empiris)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas:**Jika bergabungnya kawasan Krimea kedalam bagian Federasi Rusia berdasar pada kepentingan Rusia atas Ekonomi,Militer,dan Geopolitik di Krimea. | 1. Kepentingan Ekonomi Rusia atas Krimea terlihat jelas karena di Krimea terdapat jaringan pipa gas yang dapat mengirim gas Rusia keseluruh eropa.
2. Sedangkan dalam hal Militer,Terdapat pelabuhan Militer angkatan laut Rusia di Sevastopol yang juga menjadi termasuk dari Krimea.
3. Dalam aspek Geopolitik,Bergabungnya Krimea tentu akan menambah perluasan wilayah Rusia secara fisik
 | <http://www.kompasiana.com/masaji/krisis-crimea-sebuah-analisis_54f3ef77745513802b6c8333><http://www.kompasiana.com/masaji/krisis-crimea-sebuah-analisis_54f3ef77745513802b6c8333><http://www.kompasiana.com/masaji/krisis-crimea-sebuah-analisis_54f3ef77745513802b6c8333> |
| **Variabel Terikat:** Maka,akan mengancam kedaulatan Ukraina dan menggangu Superiortias Amerika Serikat dalam penanganan konflik dan pengaruhnya di kawasan Eropa Timur | 1. Rusia jelas melakukan Intervensi dalam Konflik Ukraina yang menyebabkan Krimea lepas dari Ukraina.
2. Amerika Serikat tentunya tidak dapat menyelesaikan konflik Ukraina,hal ini terlihat dari fakta bahwa Ukraina sampai saat ini masih dalam keadaan perang.
3. Pengaruh Amerika Serikat sebagai Police world tidak besar dikawasan eropa timur berdasar fakta bahwa Amerika Serikat tidak dapat mencegah Krimea yang memilih bergabung ke Federasi Rusia.
 | http://international.sindonews.com/read/840594/42/kesal-obama-rusia-langgar-kedaulatan-ukraina-1393814713<http://www.voaindonesia.com/content/rusia-kecam-peran-as-dalam-konflik-ukraina-/2780047.html>http://indonesia.rbth.com/politics/2014/04/04/apakah\_rusia\_butuh\_amerika\_23521 |
|  |  |  |

1. **Skema Teoritis**

**Ukraina.**

**Konflik.**

**Amerika Serikat**

**Krimea.**

**Federasi Rusia**

**Penolakan/Pihak Kontra**

**Intervensi Rusia**

**Referendum**

**Pengaruh Konflik Ukraina Terhadap Bergabungnya Krimea Pada Federasi Rusia.**

* 1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
		1. **Tingkat Analisis**

Tingkat penelitian dilakukan untuk mempermudah penulis dalam memilah masalah yang akan di analisis. Adapun tingkat analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat analisis kolerasionis, dimana unit ekspalansi dan unit analisa berada pada tingkat yang sama. Unit ekplanasi dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh dari sebuah konflik internal Ukraina yang membuat negara super power seperti Rusia mengambil peran untuk intervensi dalam kepentingannya atas kawasan Krimea.

* + 1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dan deskriptif. Metode penelitian kualitatif sendiri lebih menekankan aspek pencarian makna dibalik kenyataan empiris dan realitas sosial yang ada sehingga pemahaman yang mendalam akan realitas sosial tersebut dapat tercapai. Pada akhirnya penelitian kualitatif menjadi lebih mudah dipahami sebagai metode di mana datanya dapat berupa pernyataan-pernyataan dan data yang dihasilkan pun berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti, yaitu kata-kata baik tertulis maupun lisan. Dan metode kualitatif-eksploratif dianggap tepat untuk memberikan pemahaman dan pemaparan yang komprehensif terkait dengan pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini memaparkan bagaimana sebuah konflik yang terjadi di suatu negara yang dimana Ukraina memberI dampak besar pada konstalasi politik Internasional yang mencakup Rusia dan Krimea khususnya.

**1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaahan literatur atau referensi baik yang bersumber artikel-artikel, majalah-majalah, surat kabar, jurnal, buletin-buletin, internet, maupun catatan-catatan penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

**1.6. Lokasi dan Lamanya Penelitian**

**1.6.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan untuk menyusun tugas akhir (Skripsi) ini dilakukan di berbagai tempat, diantaranya:

1. Perpustakaan Kementerian Luar Negeri RI, JL. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat 10110.
2. Kementerian Luar Negeri Rusia untuk RI, JL.K.H.Rasuna Said Kav.X-7, 1-2 Jakarta.
3. Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia, JL.Diponegoro No.12 Menteng, Jakarta.
4. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, JL. Lengkong Besar No.68 Bandung.
5. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan,JL. Ciumbuleuit No.94 Bandung.
6. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, JL.Tri Darma Gadjah Mada, Bulak Sumur, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

**1.6.2 Lama Penelitian**

Lama Penelitian adalah 6 (enam) bulan terhitung Oktober 2015 hingga April 2016.

**1.7. Sistematika Penulisan**

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Berisikan Uraian atau informasi umum/dasar/awal/mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable bebas. Disini penulis menjelaskan secara umum mengenai Pengaruh Konflik Ukraina.

**BAB III: OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Bab ini mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable terikat. Dalam bab ini penulis menjelaskan bagaimana perkembangan bergabungnya Krimea pada Federasi Rusia.

**BAB IV: VERIFIKASI DATA**

Bab ini berisikan uraian data yang menjawab indikator variabel bebas dan terikat. Adapun isi dari bab ini ialah Implikasi dari Pengaruh Konflik Ukraina terhadap bergabungnya Krimea pada Federasi Rusia.

**BAB V: KESIMPULAN**

Adalah Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian yang menunjukkan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasannya dan kata penutup serta saran.

1. https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa\_Ukraina. Diakses tanggal 27 oktober 2015. [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://id.wikipedia.org/wiki/Ukraina>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-3)
3. Arief Munandar,2014.Hukum Internasional tentang Krimea,Blog. Diakses tanggal 27 oktober 2015 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid,hal 2. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid,hal 3. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-6)
6. Arief Munandar,2014.Hukum Internasional tentang Krimea,Blog. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-7)
7. <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/485860-ini-sejarah-sevastopol-di-crimea--wilayah-ukraina-berbau-rusia>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-8)
8. <http://news.detik.com/read/2014/03/02/133044/2512678/1148/apa-yang-membedakan-crimea-dengan-kota-di-negara-ukraina-lainnya?nd772204btr>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-9)
9. <http://palingaktual.com/388254/rusia-amp-crimea-punya-pertalian-persaudaraan/read/.Diakses> pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-10)
10. [Kiev protesters gather, EU and Putin joust](http://www.reuters.com/article/2013/12/12/us-ukraine-idUSBRE9BA04420131212), [Reuters](https://id.wikipedia.org/wiki/Reuters) (12 Desember 2013). Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-11)
11. <http://indonesia.rbth.com/krisis_ukraina>. Diakses padatanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-12)
12. [Four reported dead, more than 100 injured as violent clashes break out near Ukraine's parliament (live updates)"](http://web.archive.org/web/20081201194141/http%3A/www.kyivpost.com/content/kyiv/renewed-violence-breaks-out-today-near-ukraines-parliament-at-least-one-injured-336993.html). *[Kyiv Post](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyiv_Post&action=edit&redlink=1" \o "Kyiv Post (halaman belum tersedia))*. 18 February 2014. Diakses padatanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-13)
13. [Ukraine Violence Leaves at Least 10 Dead"](http://web.archive.org/web/20081201194141/http%3A/abcnews.go.com/International/ukraine-violence-leaves-dead/story?id=22566049). ABC News. 18 February 2014. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-14)
14. [Ukrainian Police Authorized to Use Live Ammo as Battle Rages"](http://web.archive.org/web/20081201194141/http%3A/en.ria.ru/world/20140220/187726857/Ukrainian-Police-Authorized-to-Use-Live-Ammo-as-Battle-Rages.html). [RIA Novosti](https://id.wikipedia.org/wiki/RIA_Novosti%22%20%5Co%20%22RIA%20Novosti). 20 February 2014.Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-15)
15. Margarete Klein (April 2015). *["Ukraine's volunteer battalions – advantages and challenges"](http://www.foi.se/Documents/RUFS%20Briefing%20No.%2027%20.pdf)* (PDF). Swedish Defence Research Agency.Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-16)
16. <http://indonesia.rbth.com/politics/2014/02/26/rusia_tidak_percaya_revolusi_maidan_dapat_tingkatkan_stabilitas_di_u_23289>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid,hal 2. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid,hal 3. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-19)
19. Ibid,hal 4. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibid,hal 5. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-21)
21. Jujun S. Suriasumantri, *Fisafat ilmu : Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta : Pustaka Sinar Rajawali, 1990), hlm. 128. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-22)
22. <http://fisipunsil.blogspot.co.id/2010/04/pengertian-negara.html>. Diakses pada tanggal 2 November 2015 [↑](#footnote-ref-23)
23. [http://pengertianmenurutahli.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-kedaulatan-negara.html#](http://pengertianmenurutahli.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-kedaulatan-negara.html) Diakses pada tanggal 4 November 2015 [↑](#footnote-ref-24)
24. <http://www.definisi-pengertian.com/2015/08/pengertian-demokrasi-definisi-menurut-ahli.html>. Diakses pada tanggal 4 November 2015 [↑](#footnote-ref-25)
25. <https://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli/>. Diakeses pada tanggal 27 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-26)
26. [Ibid.](https://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli/) Hal 2. Diakeses pada tanggal 27 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-27)
27. <http://www.artikelsiana.com/2015/03/pengertian-politik-luar-negeri-tujuan.html>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-28)
28. Hyndman, James E., 1970/1971. National Interest and the New Look. International Journal, Vol. 26, No. 1: pp. 5-18.Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-29)
29. Tom Bottomore, dkk. 1979. Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosphy. Victoria: Penguin Books. page. 34. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-30)
30. Chris Loveman: *Assessing the Phenomeon of Proxy Intervention*. From Journal of Conflict, Security and Development, edition 2.3, Routledge 2002, page 30–48. Diakses pada tanggal 2 November 2015 [↑](#footnote-ref-31)
31. <http://www.apapengertianahli.com/2015/06/pengertian-negara-federal-ciri-contoh.html>. Diakses pada tanggal 2 November 2015 [↑](#footnote-ref-32)
32. <https://vhykumiko.wordpress.com/2014/03/11/kepentingan-politik-sebagai-sumber-intervensi/> Diakses pada tanggal 4 November 2015 [↑](#footnote-ref-33)
33. <http://dilihatya.com/2723/pengertian-intervensi-menurut-para-ahli-adalah>. Diakses pada tanggal 4 November 2015 [↑](#footnote-ref-34)
34. <http://xcontohmakalah.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-referendum-adalah.html> Diakses pada tanggal 4 November 2015. [↑](#footnote-ref-35)
35. <http://news.liputan6.com/read/2019849/pm-ukraina-referendum-crimea-ilegal>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-36)
36. <http://internasional.kompas.com/read/2014/03/17/1608550/Putin.Referendum.Crimea.Sesuai.Hukum.Internasional.Diakses> pada tanggal 28 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-37)
37. <https://www.rt.com/news/239197-putin-crimea-referendum-decision/> Diakses padatanggal 28 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-38)
38. <http://internasional.kompas.com/read/2014/03/17/1608550/Putin.Referendum.Crimea.Sesuai.Hukum.Internasional>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-39)